

---

INSTITUT FLSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO  
JURNAL AKADEMIKA

<https://journal.iftkledalero.ac.id/index.php/AKD/index>

---

## Konsolidasi Kekuasaan dan Tantangan Demokrasi di Era Kepemimpinan Joko Widodo: antara Pembangunan Ekonomi dan Stabilitas Politik

---

Febrian Mulyadi Angsemin\*

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif

Email: febriangsemin267@gmail.com

---

### *Abstract*

*Kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 mencerminkan transformasi dalam tata kelola politik dan demokrasi Indonesia. Berbeda dengan pendahulu-pendahulunya, Jokowi mengutamakan pembangunan ekonomi, khususnya infrastruktur, sebagai prioritas utama pemerintahannya, dengan tujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Namun, konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Jokowi, termasuk kooptasi partai oposisi, penggunaan patronase politik, dan keterlibatan militer dalam urusan sipil, menimbulkan kekhawatiran terkait melemahnya checks and balances, transparansi, serta kualitas demokrasi. Meski berhasil menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan akselerasi pembangunan, konsolidasi ini juga diiringi kritik terhadap penurunan kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan meningkatnya peran eksekutif di atas lembaga legislatif serta yudikatif. Tantangan lain dalam kepemimpinannya termasuk dinamika konflik di Papua, penerapan UU ITE yang kontroversial, serta peran Indonesia dalam diplomasi internasional. Studi ini menyoroti bagaimana Jokowi mengelola kekuasaan dan menjalankan agenda pembangunan di tengah kritik terkait potensi kemunduran demokrasi.*

**Kata Kunci:** *Konsolidasi kekuasaan, demokrasi, infrastruktur, hak asasi manusia, Joko Widodo..*

### Pendahuluan

Kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sejak tahun 2014 menandai fase baru dalam evolusi demokrasi dan tata kelola politik Indonesia pasca-reformasi. Sebagai seorang pemimpin yang berasal dari luar kalangan elite politik dan militer, Jokowi menciptakan citra pemimpin populis yang dekat dengan rakyat, sekaligus mengusung pendekatan pemerintahan yang pragmatis. Berbeda dengan pendahulu-pendahulunya, kepemimpinan Jokowi lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi, khususnya infrastruktur, yang diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Namun, di balik narasi pembangunan tersebut, terdapat berbagai isu krusial terkait dinamika demokrasi dan konsolidasi kekuasaan di bawah pemerintahannya.

Salah satu aspek penting dalam memahami kepemimpinan Jokowi adalah pengelolaan konsolidasi kekuasaan. Sejak awal, Jokowi menghadapi tantangan dalam hal dukungan politik, terutama pada masa jabatan pertamanya ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai pengusungnya, tidak memiliki kursi mayoritas penuh di parlemen. Melalui koalisi politik yang cermat,

serta pendekatan negosiasi dan kompromi, Jokowi berhasil mengamankan dukungan politik yang stabil di legislatif. Namun, proses ini tidak terlepas dari tuduhan bahwa konsolidasi kekuasaan yang dilakukannya mengurangi efektivitas checks and balances, yang merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang sehat.

Transformasi ekonomi menjadi agenda utama dalam kepemimpinan Jokowi, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur berskala besar. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga program elektrifikasi nasional menjadi simbol keberhasilan pemerintahannya dalam mempercepat pembangunan. Jokowi mengedepankan narasi bahwa infrastruktur akan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperbaiki distribusi ekonomi, terutama untuk daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, berbagai kritik muncul terkait kebijakan pembangunan yang masif ini, yang dianggap mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sering kali dilakukan tanpa konsultasi publik yang memadai, sehingga memicu resistensi dari kelompok masyarakat sipil dan aktivis lingkungan.

Di sisi lain, pemerintahan Jokowi juga menghadapi tantangan dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Meskipun Indonesia tetap mempertahankan ciri-ciri dasar demokrasi seperti pemilihan umum langsung dan kebebasan pers, beberapa kebijakan pemerintah memunculkan kekhawatiran mengenai mundurnya kualitas demokrasi di Indonesia. Salah satu isu yang mencuat adalah penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sering digunakan untuk menindak kritik terhadap pemerintah di media sosial. Kasus-kasus ini menimbulkan perdebatan tentang kebebasan berpendapat di era digital, di mana pemerintah dituduh semakin represif dalam menghadapi kritik.

Selain itu, penanganan konflik di Papua juga menjadi sorotan. Di era Jokowi, meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk pembangunan di Papua, pendekatan yang digunakan tetap didominasi oleh pendekatan keamanan. Kekerasan antara aparat keamanan dan kelompok separatis di Papua masih terus terjadi, dan pelanggaran HAM di wilayah tersebut menimbulkan kritik dari organisasi hak asasi manusia, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan penghormatan terhadap hak-hak warga negara di daerah konflik.

Kompleksitas kepemimpinan Jokowi juga dapat dilihat dalam konteks dinamika global. Pemerintahannya mengambil langkah aktif dalam diplomasi ekonomi internasional, terutama dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara seperti China dan Amerika Serikat. Namun, pendekatan pragmatis ini juga menimbulkan tantangan geopolitik, terutama terkait peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara yang semakin dipengaruhi oleh ketegangan antara kekuatan global utama. Jokowi berupaya menyeimbangkan kebijakan luar negeri dengan menjaga independensi politik, namun dinamika geopolitik global sering kali memberikan tekanan bagi Indonesia untuk memilih sisi tertentu dalam konflik internasional.

Melalui rekonstruksi kebijakan yang berfokus pada transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan konsolidasi kekuasaan, kepemimpinan Jokowi menawarkan model baru dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Namun, model ini menghadapi sejumlah masalah yang kompleks, terutama terkait bagaimana strategi konsolidasi kekuasaan Jokowi memengaruhi stabilitas politik, efektivitas checks and balances, serta prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi yang dicanangkan Jokowi memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Tantangan lain yang muncul

adalah kritik mengenai kemunduran demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ambisius ini, khususnya yang berkaitan dengan konflik lahan dan hak masyarakat sipil. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana model kepemimpinan dan konsolidasi kekuasaan Jokowi memengaruhi dinamika politik, pembangunan ekonomi, dan isu-isu demokrasi serta hak asasi manusia di Indonesia.

### **Konsolidasi Kekuasaan Di Era Joko Widodo**

Konsolidasi kekuasaan menjadi salah satu karakteristik utama kepemimpinan Joko Widodo. Sejak terpilih sebagai Presiden pada 2014, Jokowi menghadapi tantangan besar dalam membangun basis dukungan politik yang kuat. Pada awal masa jabatannya, Jokowi tidak memiliki kontrol penuh atas parlemen, mengingat koalisi pendukungnya di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tergolong minoritas. Untuk mengatasi ini, Jokowi mengadopsi pendekatan koalisi pragmatis yang melibatkan partai-partai di luar kubu pendukungnya demi menciptakan stabilitas politik yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahannya. Langkah ini dinilai berhasil dalam membentuk konsolidasi politik yang kuat, meski mengundang kritik terkait potensi melemahnya mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan.

Dalam konsolidasi kekuasaan ini, Jokowi juga mengandalkan peran strategis dari sejumlah aktor politik kunci yang berasal dari kalangan elite dan militer. Salah satu tokoh penting dalam hal ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang sering disebut sebagai “tangan kanan” Jokowi dalam berbagai isu krusial. Keberadaan tokoh-tokoh semacam ini mengindikasikan bahwa meskipun Jokowi tampil sebagai figur pemimpin yang “merakyat,” pemerintahan tetap didominasi oleh elite politik yang berperan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional.

Selain itu, Jokowi menggunakan kebijakan kabinet sebagai alat konsolidasi politik. Dalam menyusun kabinet, Jokowi memasukkan representasi dari berbagai partai politik, bahkan yang semula berseberangan dengannya. Misalnya, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang awalnya berada di kubu oposisi, akhirnya bergabung dalam koalisi pemerintah. Hal ini mengindikasikan bagaimana strategi Jokowi untuk “merangkul lawan” dalam rangka memperkuat dukungan politiknya, sekaligus mengurangi potensi gangguan dari pihak oposisi. Kendati efektif dalam menjaga stabilitas politik, strategi ini memunculkan kekhawatiran tentang menurunnya kualitas oposisi politik di Indonesia, yang seharusnya menjadi elemen penting dalam demokrasi yang sehat.

Konsolidasi kekuasaan di bawah Jokowi juga terlihat dari perannya dalam mengamankan pengaruh di tingkat legislatif. Dalam konteks ini, DPR sering kali menunjukkan dukungan kuat terhadap berbagai kebijakan dan inisiatif pemerintah, termasuk pengesahan undang-undang kontroversial seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini, meskipun dipromosikan sebagai upaya untuk mempermudah investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menuai kritik luas dari kalangan masyarakat sipil dan buruh karena dinilai mengurangi perlindungan hak-hak tenaga kerja dan lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa konsolidasi kekuasaan Jokowi di tingkat legislatif, meskipun meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan, juga mengundang pertanyaan tentang kualitas deliberasi dan partisipasi politik yang lebih inklusif.

Lebih jauh, konsolidasi kekuasaan Jokowi tidak hanya terjadi di ranah politik domestik, tetapi juga di institusi-institusi kunci yang mengatur sektor keamanan dan hukum. Jokowi berhasil membangun hubungan dekat dengan militer dan polisi, serta mengontrol posisi-posisi strategis di lembaga peradilan.

Konsolidasi kekuasaan di sektor ini membantu pemerintahan Jokowi dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan domestik, namun pada saat yang sama menimbulkan kekhawatiran akan kecenderungan pemerintahan yang semakin sentralistik dan otoriter. Beberapa pengamat menyoroti peningkatan peran militer dalam ranah sipil dan kebijakan keamanan nasional sebagai gejala dari pola kepemimpinan yang semakin memusatkan kontrol kekuasaan di tangan pemerintah pusat, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama: Salim Said menyoroti bagaimana sejak awal berdirinya, militer Indonesia memiliki peran ganda: selain sebagai penjaga keamanan, juga sebagai aktor politik. Pada masa Orde Baru di bawah Soeharto, militer memainkan peran kunci melalui "Dwifungsi ABRI", yang memungkinkan militer terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan. Sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soeharto membuat militer semakin berperan dalam berbagai aspek pemerintahan, dari birokrasi hingga pengambilan keputusan politik. Said menyoroti bahwa ini menciptakan sebuah sistem militerisme, di mana militer bukan hanya berperan sebagai alat pemerintah, tetapi menjadi bagian dari pemerintahan yang mengendalikan politik dan kebijakan sipil.

Kedua: Mietzner mengamati peran militer setelah jatuhnya Soeharto, dan bagaimana reformasi demokrasi berusaha membatasi peran militer dalam urusan politik. Namun, ia menekankan bahwa meskipun secara formal militer tidak lagi terlibat langsung dalam politik melalui Dwifungsi, pengaruh militer masih kuat, terutama di sektor-sektor keamanan dan di daerah-daerah yang mengalami konflik. Dengan jaringan informal dan hubungan dengan elit politik, militer tetap memiliki kekuatan yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan keamanan nasional dan stabilitas politik. Mietzner menyoroti bahwa kendati peran formal militer telah berkurang, mereka tetap menjadi aktor kunci dalam menjaga stabilitas, yang mencerminkan adanya "fungsi baru" militer di era demokrasi.

Ketiga: Hermawan Sulistyو menyoroti peran militer dalam peristiwa politik 1965-1966 yang menandai peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto. Ia menekankan bagaimana militer memanfaatkan situasi darurat nasional untuk mengambil alih kekuasaan politik, memburu dan menyingkirkan lawan politik, terutama Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut Sulistyو, peran militer dalam pembantaian dan konsolidasi kekuasaan pada masa itu adalah contoh jelas bagaimana kekuasaan militer dapat merusak tatanan politik sipil, terutama dalam konteks pemerintahan yang tersentralisasi. Ia juga menekankan bahwa militer tidak hanya bertindak sebagai alat represif, tetapi juga sebagai aktor politik yang mengambil alih kendali atas negara.

Keempat: Mahfud MD membahas hubungan antara militer dan kebijakan hukum, terutama selama masa Orde Baru, di mana militer memainkan peran kunci dalam sistem hukum dan politik Indonesia. Ia mencatat bahwa Dwifungsi ABRI memberi legitimasi bagi militer untuk berperan dalam urusan sipil dan politik, yang akhirnya mengakibatkan melemahnya supremasi hukum dan demokrasi. Mahfud juga menyoroti bagaimana reformasi pasca-Soeharto berusaha membatasi peran militer, namun dalam beberapa aspek, militer tetap memiliki pengaruh yang kuat, terutama dalam masalah-masalah keamanan nasional. Ia mengkritik bahwa meskipun undang-undang telah membatasi peran formal militer dalam politik, mereka masih memainkan peran penting di balik layar dalam mendukung atau menekan kebijakan pemerintah.

Secara keseluruhan, konsolidasi kekuasaan di era Jokowi berhasil menciptakan stabilitas politik yang diperlukan untuk menjalankan berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Namun, di sisi lain, hal ini juga memunculkan kekhawatiran akan melemahnya

prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam hal checks and balances, transparansi, serta peran oposisi yang kuat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Konsolidasi kekuasaan di era Joko Widodo dapat dibagi ke dalam beberapa aspek kunci yang menguraikan bagaimana strategi politik yang diterapkan berdampak pada demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Berikut adalah beberapa anak poin utama yang mendasari strategi konsolidasi kekuasaan Jokowi:

Pertama: Kooptasi Partai Oposisi melalui Koalisi Politik. Kooptasi partai oposisi ke dalam koalisi pemerintahan merupakan strategi yang diterapkan Jokowi untuk menciptakan stabilitas politik. Langkah ini bertujuan untuk mengamankan dukungan legislatif dan meminimalisir gangguan dari oposisi. Pada masa kepresidenan Jokowi, setelah terpilih pada tahun 2014, ia awalnya tidak memiliki mayoritas yang jelas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa partai yang sebelumnya berada di kubu oposisi, seperti Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Perpindahan partai-partai ini memperkuat basis kekuasaan Jokowi, menciptakan stabilitas politik yang lebih kuat dan mengurangi potensi konflik politik di parlemen.

Namun, praktik kooptasi ini mengakibatkan melemahnya fungsi oposisi di dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang ideal, oposisi berperan penting dalam memberikan pengawasan dan keseimbangan terhadap pemerintah yang berkuasa. Kooptasi partai-partai ini berpotensi melemahkan sistem checks and balances dan memunculkan sistem politik yang didominasi oleh eksekutif. Ini juga berdampak pada pembatasan ruang bagi kritik politik dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan kontroversial pemerintah.

Kedua: Patronase Politik dan Penggunaan Jabatan Publik. Patronase politik merupakan salah satu karakteristik utama yang masih kuat dalam politik Indonesia pasca-reformasi. Di bawah kepemimpinan Jokowi, praktik patronase ini melibatkan penunjukan politikus atau figur dari partai-partai pendukungnya ke dalam posisi-posisi strategis di pemerintahan dan BUMN. Tujuannya adalah untuk menjaga loyalitas dan stabilitas politik di antara partai-partai dalam koalisi. Penunjukan ini sering kali didasarkan pada pertimbangan politik daripada kualifikasi teknokratis, yang memengaruhi efektivitas pemerintahan dan tata kelola yang baik.

Praktik patronase ini tidak hanya terjadi di dalam kabinet, tetapi juga dalam lembaga-lembaga strategis lain seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga-lembaga keamanan. Ini menciptakan relasi yang erat antara kekuasaan eksekutif dan lembaga-lembaga tersebut, yang berpotensi merusak independensi mereka. Kritik terhadap patronase politik menyoroti bahwa praktik ini menghalangi reformasi birokrasi yang dibutuhkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Ketiga: Pelemahan Peran Lembaga Legislatif dan Yudikatif. Konsolidasi kekuasaan Jokowi juga memengaruhi hubungan antara eksekutif dan lembaga-lembaga legislatif serta yudikatif. Lembaga legislatif, terutama DPR, secara bertahap lebih sering memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah tanpa melalui perdebatan substansial yang mendalam. Salah satu contoh adalah pengesahan "Omnibus Law" atau Undang-Undang Cipta Kerja, yang mendapat banyak kritik dari masyarakat sipil karena dianggap merugikan buruh dan lingkungan, tetapi tetap didukung oleh mayoritas anggota DPR. Situasi ini menunjukkan bahwa oposisi di parlemen semakin melemah, yang berimplikasi pada menurunnya kualitas deliberasi demokratis.

Di sisi lain, pengaruh eksekutif terhadap lembaga yudikatif juga mengkhawatirkan. Jokowi dinilai telah memperkuat pengaruhnya di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui penunjukan hakim-hakim yang dekat dengan kekuasaan. Ketika lembaga-lembaga yudikatif tidak lagi sepenuhnya independen, pengawasan terhadap eksekutif melemah, yang pada akhirnya memperburuk kondisi demokrasi di Indonesia. Praktik ini menggambarkan adanya risiko “autoritarianisme halus” di mana presiden berhasil mengendalikan berbagai institusi tanpa melakukan tindakan represif secara terang-terangan.

Keempat: Militerisasi Kebijakan dan Peran TNI dalam Sektor Sipil. Selama masa kepemimpinan Jokowi, terdapat peningkatan keterlibatan militer dalam urusan sipil. Meskipun Indonesia telah melakukan reformasi militer setelah era Suharto, yang membatasi peran TNI dalam politik, keterlibatan militer kembali terlihat di bawah pemerintahan Jokowi. Salah satu contohnya adalah partisipasi militer dalam program-program infrastruktur nasional serta penanganan masalah keamanan domestik, seperti konflik di Papua dan pengamanan pemilu. Keterlibatan ini menandakan bahwa militer masih memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia, dan ini menimbulkan kekhawatiran tentang kembalinya pola-pola otoritarianisme militer di ranah sipil.

Keterlibatan militer dalam urusan sipil dianggap sebagai strategi untuk memperkuat stabilitas politik jangka pendek, tetapi dapat membahayakan demokrasi dalam jangka panjang. Penggunaan militer untuk menangani isu-isu non-keamanan juga membuka peluang bagi militer untuk memperluas pengaruhnya dalam pemerintahan, yang dapat mengancam supremasi sipil dalam politik Indonesia.

Kelima: Sentralisasi Kekuasaan di Eksekutif. Di bawah Jokowi, sentralisasi kekuasaan semakin kuat, terutama melalui pengendalian birokrasi dan penunjukan figur-figur kunci dalam pemerintahan. Sentralisasi ini berfokus pada penguatan otoritas presiden dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk kebijakan ekonomi, keamanan, dan diplomasi. Salah satu contoh konkret adalah cara Jokowi mengkonsolidasikan pengaruhnya dalam penanganan pandemi COVID-19, di mana ia mengoordinasikan berbagai lembaga pemerintah secara langsung dan memperkuat peran TNI dan Polri dalam penanganan krisis. Sentralisasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif dalam situasi krisis, tetapi di sisi lain, mengurangi peran lembaga-lembaga negara lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Penguatan eksekutif tanpa diimbangi oleh penguatan peran legislatif dan yudikatif menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur pemerintahan, yang berpotensi melemahkan institusi-institusi demokrasi lainnya.

## **Dampak Konsolidasi Kekuasaan Joko Widodo Terhadap Demokrasi Dan Kebijakan Publik**

Setelah menganalisis bagaimana Joko Widodo berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya melalui koalisi politik yang pragmatis serta aliansi dengan berbagai kekuatan politik, penting untuk memahami lebih lanjut dampak dari konsolidasi tersebut terhadap demokrasi di Indonesia serta kebijakan publik yang dihasilkan. Konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh Joko Widodo tidak hanya menciptakan stabilitas politik, tetapi juga menimbulkan beberapa tantangan serius bagi kualitas demokrasi, terutama terkait peran oposisi, mekanisme checks and balances, serta pelibatan masyarakat sipil.

### **Pertama: Dampak terhadap Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan**

Konsolidasi kekuasaan Joko Widodo memiliki dampak besar terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi, terutama pada pembangunan infrastruktur berskala besar. Melalui penguasaan politik yang kuat, Jokowi dapat mengesahkan kebijakan penting seperti “Undang-Undang Cipta Kerja” atau “Omnibus Law”, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi asing, mempercepat proyek pembangunan, serta membuka lapangan pekerjaan. Meski demikian, kebijakan ini mendapat penolakan luas dari masyarakat, terutama serikat buruh dan aktivis lingkungan, yang menilai kebijakan tersebut melemahkan hak-hak pekerja serta perlindungan terhadap lingkungan. Menurut Hadiz, konsolidasi politik yang dilakukan oleh Jokowi memungkinkan percepatan pengambilan keputusan di sektor ekonomi. Namun, dampak jangka panjang dari deregulasi ini terhadap pekerja dan lingkungan menjadi perhatian serius dari kelompok masyarakat sipil yang menuntut adanya perlindungan lebih.

### **Kedua: Melemahnya Peran Oposisi dan Keseimbangan Demokrasi**

Dalam demokrasi yang sehat, peran oposisi sangat penting sebagai pengawas pemerintah. Namun, di bawah kepemimpinan Jokowi, oposisi di Indonesia mengalami pelemahan signifikan. Kebijakan politik Jokowi yang merangkul partai-partai oposisi, seperti Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), ke dalam koalisi pemerintah menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pemerintah. Hilangnya kekuatan oposisi ini berdampak langsung pada mekanisme checks and balances yang merupakan elemen vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam demokrasi.

Mietzner menjelaskan bahwa konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Jokowi menghasilkan stabilitas politik, namun menurunkan kualitas demokrasi karena hilangnya oposisi yang kuat dan independen. Hal ini mengakibatkan risiko semakin berkurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik.

### **Ketiga: Perubahan Dinamika Koalisi Politik**

Konsolidasi kekuasaan Jokowi juga mengubah dinamika koalisi politik di Indonesia. Partai-partai yang awalnya berada di posisi oposisi, seperti Golkar dan PAN, bergabung dengan koalisi pemerintah, yang menunjukkan bahwa partai-partai di Indonesia semakin pragmatis dan berorientasi pada kepentingan kekuasaan daripada ideologi. Perubahan koalisi ini menyebabkan lemahnya stabilitas politik jangka panjang, meskipun dalam jangka pendek memberikan keuntungan bagi pemerintahan dalam meloloskan berbagai kebijakan.

Aspinall dan Mietzner menyebutkan bahwa konsolidasi kekuasaan Jokowi menciptakan koalisi politik yang cair, yang memudahkan pemerintah dalam meloloskan berbagai kebijakan. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa dinamika politik ini menciptakan situasi yang rentan bagi stabilitas politik di masa depan.

### **Keempat: Hubungan Konsolidasi Kekuasaan dengan Kebijakan Keamanan**

Selain konsolidasi politik, Jokowi juga memperkuat hubungan dengan institusi keamanan seperti militer dan kepolisian. Keterlibatan militer dalam kebijakan-kebijakan sipil, terutama dalam menangani

isu-isu keamanan domestik seperti terorisme dan separatisme, semakin meningkat selama masa pemerintahan Jokowi. Langkah ini dianggap berhasil menjaga stabilitas negara, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran akan kembalinya militerisasi dalam politik sipil.

Menurut Hadiz, semakin besar peran militer dalam kebijakan sipil selama masa pemerintahan Jokowi mengindikasikan kembalinya pengaruh militer dalam politik Indonesia, yang bisa menjadi ancaman bagi demokrasi dan keterbukaan sipil.

#### **Kelima: Tantangan yang Muncul**

Konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Jokowi juga memicu perlawanan dari berbagai elemen masyarakat, terutama kalangan buruh dan aktivis hak asasi manusia. Kebijakan ekonomi seperti “Omnibus Law” memicu demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia. Pemerintah merespons protes ini dengan pendekatan yang represif, termasuk melibatkan aparat keamanan untuk meredam aksi-aksi protes tersebut. Langkah ini semakin menambah kekhawatiran terhadap kecenderungan otoritarianisme dalam pemerintahan Jokowi.

Warburton, mencatat bahwa tantangan terbesar dari konsolidasi kekuasaan ini adalah munculnya gerakan protes dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan ekonomi yang dianggap tidak inklusif. Protes tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan yang meluas terhadap kebijakan pemerintah.

#### **Keenam: Warisan Kepemimpinan Jokowi dan Masa Depan Politik Indonesia**

Warisan dari konsolidasi kekuasaan yang dibangun oleh Jokowi akan berpengaruh pada masa depan politik Indonesia, terutama menjelang Pemilihan Presiden 2024. Stabilitas politik yang dicapai selama masa kepemimpinan Jokowi memungkinkan pemerintah menjalankan program-program pembangunan besar, namun hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan demokrasi di Indonesia. Apakah pola konsolidasi ini akan dilanjutkan oleh penerusnya, atau justru Indonesia akan kembali pada sistem politik yang lebih plural dan kompetitif?

Aspinall dan Mietzner menyatakan bahwa meskipun konsolidasi kekuasaan Jokowi menghasilkan stabilitas dalam jangka pendek, ketergantungan pada elit politik dan militer berpotensi merusak pluralisme politik di masa depan. Selanjutnya konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Joko Widodo telah menghasilkan stabilitas politik yang memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan strategis, seperti pembangunan infrastruktur dan deregulasi ekonomi. Namun, konsolidasi ini juga memunculkan sejumlah tantangan serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, terutama terkait melemahnya peran oposisi, meningkatnya peran militer dalam urusan sipil, serta tekanan terhadap kelompok masyarakat sipil. Dampak dari konsolidasi ini akan menjadi warisan penting yang menentukan arah masa depan politik Indonesia, khususnya terkait keseimbangan antara stabilitas politik dan demokrasi yang sehat.

#### **Analisis Gaya Kepemimpinan Joko Widodo: Antara Partisipasi, Strategi, dan Tantangan dalam Diplomasi Global**

Joko Widodo (Jokowi) dikenal sebagai seorang pemimpin yang menekankan pentingnya musyawarah dalam proses formulasi serta implementasi kebijakan. Namun, dalam beberapa kesempatan,

Jokowi kerap dianggap kurang tegas dan cenderung ragu-ragu dalam mengambil keputusan, yang kemudian menjadi sorotan kritis dari para pengamat kepemimpinan. Di samping itu, Jokowi juga menunjukkan karakter kepemimpinan yang partisipatif, sebagaimana terlihat dari pola pendelegasian tugas kepada para menteri yang berada di bawah kepemimpinannya. Sebagai contoh, dalam menghadapi masalah penangkapan ikan ilegal, Jokowi menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Demikian pula, isu terkait Ujian Nasional dipercayakan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyelesaiannya.

Kendati demikian, Jokowi tidak luput dari kritik, khususnya terkait keputusan politik dalam proses pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Kandidat yang diusulkan oleh Jokowi dinilai tidak layak menduduki jabatan tersebut karena yang bersangkutan merupakan tersangka kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan ini menunjukkan bahwa Jokowi dianggap kurang mampu membuat keputusan strategis dalam situasi krisis, terutama dalam menentukan apakah ia akan bersikukuh pada pilihannya atau memilih untuk meninjau ulang usulan tersebut secara lebih bijaksana.

Dalam ranah kebijakan luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan pertahanan, Jokowi terlihat menunjukkan kecenderungan untuk mempererat hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini terlihat dari pilihan Jokowi untuk melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke Tiongkok setelah dilantik sebagai Presiden Indonesia. Selain itu, pendekatan komunikasi Jokowi di forum internasional, yang lebih banyak menggunakan strategi promosi untuk memperkenalkan Indonesia, juga menuai kritik, karena dianggap lebih menyerupai metode pemasaran daripada menunjukkan posisi strategis Indonesia di panggung global.

Secara keseluruhan, meskipun gaya kepemimpinan dan komunikasi Jokowi yang sederhana sering kali dipandang positif, terdapat kebutuhan untuk memperkuat kepemimpinannya, khususnya dalam konteks hubungan internasional. Kepemimpinan Jokowi yang dinilai sudah kuat dalam skala domestik diharapkan dapat diimbangi dengan peningkatan kewibawaan dan ketegasan dalam arena global.

## Penutup

Kepemimpinan Joko Widodo membawa pergeseran besar dalam politik Indonesia, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi sebagai pilar pemerintahan. Melalui konsolidasi kekuasaan-melibatkan kooptasi partai oposisi, penguatan eksekutif, dan meningkatnya peran militer dalam urusan sipil-Jokowi berhasil menciptakan stabilitas politik yang mendukung agenda pembangunan nasional. Namun, pendekatan ini memunculkan kekhawatiran terkait penurunan kualitas demokrasi, khususnya dalam melemahkan mekanisme checks and balances, independensi lembaga negara, dan kebebasan berpendapat.

Konsolidasi kekuasaan ini memfasilitasi percepatan kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan deregulasi ekonomi, tetapi juga menimbulkan kritik terkait hak asasi manusia dan kemunduran demokrasi, terutama dengan penggunaan UU ITE untuk membungkam kritik dan meningkatnya peran militer di ranah sipil. Selain itu, penanganan konflik di Papua menunjukkan tantangan Jokowi dalam menjaga stabilitas tanpa mengorbankan nilai demokrasi.

Di masa mendatang, pemerintahan pasca-Jokowi perlu mempertahankan keseimbangan antara stabilitas politik dan komitmen terhadap demokrasi yang inklusif. Penguatan checks and balances, peran

kritis oposisi, serta transparansi dalam kebijakan akan menjadi kunci agar Indonesia tetap maju secara ekonomi dan tetap kokoh sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara.

## Daftar Rujukan

Buku:

Aspinall, Edward. dan Mietzner, Marcus. *Politik Indonesia pada 2019: Kemenangan Tak Sempurna Jokowi dan Kemenangan Hampir Sempurna*. Penerbit: ISEAS Publishing (Institute of Southeast Asian Studies), Singapura, 2019.

\_\_\_\_\_. *Politik Indonesia: Pemilu 2019 dan Tantangan Demokrasi*. Singapore: ISEAS Publishing 2019.

Butt, Simon. *Judicial Review in Indonesia: Between Civil Law and Accountability*. Penerbit: Cambridge University Press, 2017.

G, Fealy. *Jokowi in the New Indonesia: Reforms, Patronage, and Tradition*. Southeast Asian Affairs: 2016.

Hadiz, Vedi R. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Penerbit: Cambridge University Press, 2016.

\_\_\_\_\_. *Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia: Politik Oligarki di Era Pasar*. New York: Routledge 2017.

*Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline*. Pacific Affairs: 2018.

Mahfud MD, Mohammad. *Politik Hukum di Indonesia*. Penerbit: Rajawali Press, 2009.

Marcus, Mietzner. *Menghidupkan Kembali Populisme Asia: Kebangkitan Jokowi, Demokrasi, dan Pertarungan Politik di Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2015.

\_\_\_\_\_. *Militer, Politik, dan Demokrasi di Indonesia: Menuju Dwi Fungsi Baru*. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

\_\_\_\_\_. *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia*. Penerbit: ISEAS Publishing Institute of Southeast Asian Studies, 2019.

Marsh, Ian. dan Blondel, Jean. *Democratic Decline and Democratic Renewal*. Penerbit: Routledge, 2017.

Muhtadi, Burhanuddin. *Perang Bintang Politik: Jokowi dan Populisme di Indonesia*. Penerbit: Mizan, 2019.

Sulistyo, Hermawan. *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966)*. Penerbit: Komunitas Bambu, 2000.

Jurnal:

Aaron, Connelly. "Indonesia's Military Politics and Democratic Consolidation", *Jurnal akademik Volume dan Isu: Volume 96, Isu 3*. Penerbit: *International Affairs*, 2020.

Aspinall, Edward. dan Mietzner. Marcus. "Pemilu Bermasalah di Asia Tenggara: Pluralisme Non-Demokratis di Indonesia". *Jurnal*. Penerbit: Jurnal Demokrasi, 2020.

D, Hanan. "Political Patronage and Governance Reform in Indonesia under Joko Widodo: A Critical Analysis". *Journal of Southeast Asian Studies*, Desember 202.

D, Tomsa. "The Evolution of Indonesian Political Parties in the Post-Suharto Era: From Perpetuation to Democratization". *Asian Journal of Political Science*, Desember 2020.

Eve, Warburton. "Ekonomi Politik Populisme di Indonesia: Kebangkitan dan Kejatuhan Jokowi", *Jurnal Kajian Asia Tenggara*. Asia Tenggara: Agustus 2020.

Hapsari, Sekar. "Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam Perspektif Sistem Pertahanan Negara Sebagai Upaya Menghadapi Ancaman Asimetrik Abad 21". *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 5 No*. Penerbit: Jakarta, 2018.

Laksmiana, Evan A. "Indonesia's Civil-Military Relations in the COVID-19 Pandemic", *Jurnal akademik*. Penerbit: *The Pacific Review*, 2020.

O, Tornquist. "Assessing Democracy from Below: Experiences from Indonesia". *Journal Palgrave Macmillan*, Macmillan: 2019.

Robison, Richard. "*Indonesia: The Rise of Capital, the Fall of Constitutionalism*", *Jurnal akademik*. Penerbit: *Southeast Asian Affairs*, 2020.

Rosser A. "The Politics of Inequality in Indonesia: Political Capture and Elite Cartels". *Journal Asian Studies Review*. Asian: Juni 2019.

Said, Salim. *Tumbuh dan Tumbangnya Militerisme di Indonesia*. Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, 199.

S, Mujani. dan R. W Liddle. "Indonesian Democracy: From Transition to Consolidation". *Journal Cambridge University Press*, University: Desember 2019.

Sukmajati M. dan Aspinall E. "Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots". *Journal NUS Press*. Nus Press: Juni 2020.

Ufen A, dan Bunte M. "Democratization in Post-Suharto Indonesia", *Journal Routledge*. Routledge: Desember 2020.

*Internet:*

Nosa Normanda. "Sepuluh Tahun Pemerintahan Joko Widodo: Kolaborasi Elit Politik, Pembangunan Infrastruktur, dan Tantangan Demokrasi". Aviation Today,

<https://eseinosa.com/2024/09/22/sepuluh-tahun-pemerintahan-joko-widodo-kolaborasi-elit-politik-pembangunan-infrastruktur-dan-tantangan-demokrasi/>

Nosa Normanda\_22 September 2024.html, diakses pada 12 November 2024.